

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Victim blaming merupakan suatu tindakan yang menyalahkan korban pelecehan seksual dan menganggap bahwa pelecehan yang dialami korban tersebut adalah akibat dari tindakannya sendiri (Ihsani, 2021). Dalam fenomena *victim blaming*, kekerasan terhadap perempuan dianggap sebagai sesuatu yang biasa sehingga dapat membentuk pola pikir masyarakat untuk dapat melakukan hal yang sama. *Victim blaming* terjadi karena beberapa faktor yang melatarbelakanginya, yaitu seperti kurangnya edukasi tentang perilaku seksual dan adanya *rape culture* sebagai sesuatu yang tercipta dalam masyarakat karena mengajarkan laki-laki dan perempuan bahwa pemerkosaan adalah hal yang wajar dan normal (Herman, 1984). Beberapa tindakan yang sering dijumpai di masyarakat dan tergolong ke dalam *victim blaming* yaitu seperti menormalisasi kekerasan seksual karena menganggap korban pantas mendapatkannya, menyalahkan perilaku korban yang ofensif (Henning & Holdford, 2006), objektifikasi tubuh korban (Najib, 2020), menganggap rendah korban, tidak adanya sikap empati (Shopiani et al, 2021), menyalahkan karakter, penampilan, cara berperilaku, mempertanyakan mengapa mereka tidak melawan, memberikan kritik karena tidak melapor lebih cepat, dan dituntut untuk lebih berhati-hati serta membuat keputusan yang lebih baik untuk menghindari tindak kekerasan seksual (Taylor, 2020). Masyarakat yang apatis dan menyudutkan korban tersebut semakin melanggengkan tindak kekerasan seksual dan menjadikan pelaku bebas tanpa adanya beban moral atau tanggung jawab

sebagaimana mestinya. Hal ini berbanding terbalik dengan posisi perempuan korban kekerasan seksual yang semakin tersudutkan di lingkungan sosial sehingga sulit bagi mereka untuk dapat menyuarakan pendapat, berbagi pengalaman dan mendapatkan keadilan.

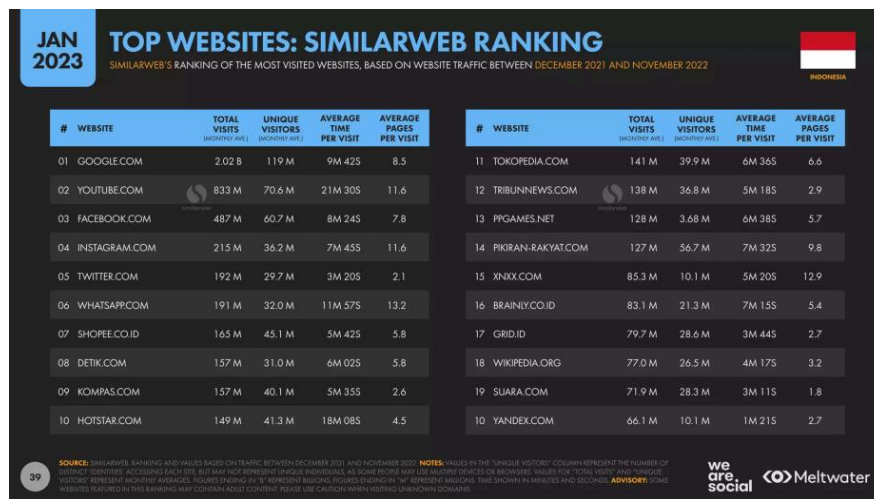
Victim blaming di Indonesia erat kaitannya dengan NCII (*Non-Consensual Dissemination of Intimate Images*), yaitu penyebaran konten foto atau video intim tanpa adanya persetujuan korban (McGlynn et al., 2017). Berbeda dengan *revenge porn*, pelaku NCII kerap kali tidak memiliki motif balas dendam tertentu kepada korban. NCII biasanya melibatkan *sextortion*, yaitu memaksa korban, memanipulasi, atau diancam untuk membagikan gambar atau video seksual mereka. Selain itu, pengalaman NCII juga mencakup pornografi non-konsensual, misalnya seperti aktivasi kamera tersembunyi dan penyebaran konten seksual non konsensual melalui berbagai metode. Dalam berbagai kasus tersebut, NCII menggarisbawahi ketiadaan atau manipulasi konsen dalam distribusi konten (Brighi et al., 2023). Muatan pornografi yang disebarluaskan secara luas di internet merupakan perbuatan yang dilarang oleh pemerintah sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Ayat (1) Jo Pasal 29 UU No 44 Tahun 2008 tentang Pornografi yang berbunyi "*Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 12 tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 250.000.000 dan paling banyak Rp 6.000.000.000,*". Dalam hal ini, keberadaan internet dan media sosial semakin mempermudah pelaku

untuk melakukan tindakan NCII kepada korban. Melalui media sosial, konten seksual non konsensual dapat dengan mudah dan cepat tersebar dengan jangkauan yang luas sehingga memberikan tekanan yang lebih besar terhadap korban.

NCII termasuk ke dalam Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO), yaitu segala tindakan yang dilakukan melalui media teknologi dan bertujuan untuk melecehkan, mengintimidasi, mengancam, atau merendahkan perempuan. Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan 2023 melaporkan bahwa kasus siber merupakan kasus kekerasan di ranah publik yang paling tinggi dengan 869 kasus yang mayoritas merupakan kasus kekerasan seksual. Secara khusus, *Southeast Asia Freedom of Expression Network* (SAFEnet) dalam Laporan Triwulan II Pemantauan Hak-Hak Digital di Indonesia mencatat bahwa selama periode bulan April-Juni 2023 terdapat 254 kasus KBGO yang mayoritas merupakan aduan kasus penyebaran konten intim tanpa izin. Jumlah ini menunjukkan peningkatan dari triwulan tahun 2022 dengan jumlah 180 kasus. Lebih lanjut, diketahui juga bahwa mayoritas kasus diadakan oleh korban perempuan dengan jumlah 152 aduan (Safenet, 2023).

Sebuah agensi *social media marketing and communication* asal Inggris merilis *Indonesian Digital Report 2023* dan menunjukkan data bahwa media sosial X (twitter) menempati peringkat kelima sebagai website yang paling banyak dikunjungi masyarakat Indonesia, yaitu dengan jumlah rata-rata 192 juta pengunjung per bulan. Lebih lanjut dalam *Indonesian Digital Report 2023*, diketahui masyarakat menggunakan internet atau media sosial dengan mayoritas alasan untuk mencari informasi (83,2%), menemukan ide atau inspirasi baru

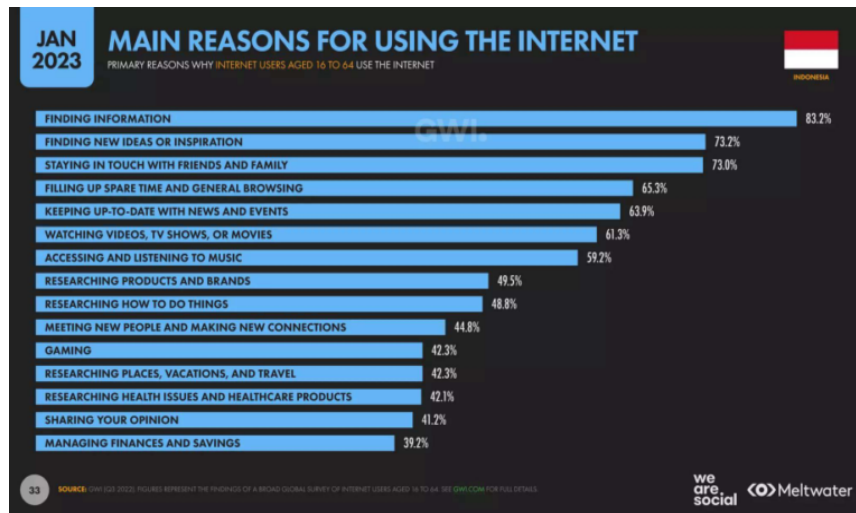
(73,2%), berkomunikasi dengan teman atau keluarga (73%), mengisi waktu luang (65,3%), *up to date* dengan berita atau peristiwa yang ada di Indonesia, menonton video, *tv shows* dan film (61,3%) serta mengakses dan mendengarkan musik (59,2%).



Gambar 1. 1 Website yang Sering Dikunjungi Masyarakat Indonesia
Sumber: We Are Social, 2023

Eksistensi media sosial X di masyarakat Indonesia juga didukung dengan adanya beberapa fitur khas X yang menjadi daya tarik bagi pengguna, yaitu seperti fitur *trending topic* yang memungkinkan pengguna mencari tahu informasi yang paling banyak dibicarakan serta fitur *autobase* yang dapat memberikan pertanyaan atau pendapat secara anonim yang kemudian disebarluaskan kepada seluruh pengikut *base* tersebut. Selain itu, media sosial X juga memfasilitasi *two way communication*, yaitu komunikasi yang dilakukan secara dua arah antara pihak pengirim dan penerima pesan dalam bentuk teks foto atau video. Media sosial X merupakan jaringan *micro blogging*, yaitu aktivitas berbagi informasi online terbatas dalam karakter pesan yang dibatasi maksimal sebanyak 280 karakter.

Adapun demikian, X telah menghasilkan peningkatan pengguna karena fungsinya yang serbaguna dan memiliki kemampuan untuk berdiskusi secara *real time* sehingga menjadikannya sebagai platform yang memiliki dampak besar pada konstruksi wacana publik (Lee et al., 2016).



Gambar 1. 2 Alasan Masyarakat Indonesia Menggunakan Internet
Sumber: We Are Social, 2023

Kemudahan mengakses informasi dan bentuk interaktivitas yang beragam kerap kali menjadikan media sosial X sebagai wadah untuk melakukan klarifikasi terhadap sebuah kasus atau mengungkap dan menyebarkan suatu kejadian atau pengalaman. Sebagai contoh, media sosial X digunakan oleh seorang warga Prancis untuk mengungkapkan pengalamannya mendapatkan pelecehan seksual dari salah satu politisi partai politik dominan di Prancis. Cerita yang diunggah pada akun @Tt_Guillaume kemudian menuai banyak respon dari masyarakat Prancis. Berdasarkan interaktivitas antar pengguna X dalam menanggapi unggahan tersebut, diketahui bahwa unggahan akun @Tt_Guillaume berperan besar dalam kebebasan berpendapat para korban dan berpengaruh terhadap tuturan-tuturan lainnya dalam

mengungkap realitas sosial kekerasan seksual di Prancis (Sulistiyawati dan Aprilia, 2022).

Dewasa ini di Indonesia, kasus KBGO di media sosial X juga marak terjadi, salah satunya yaitu kasus NCII Rebecca Klopper. Kasus tersebut bermula ketika sebuah akun anonim @dedekkugem di media sosial X mengunggah rekaman video syur yang diduga Rebecca Klopper dengan durasi selama 47 detik. Kemudahan dalam mengakses dan menyebarkan pesan pada media sosial X, serta sosok Rebecca Klopper yang menyangang status sosial sebagai figur publik membuat video sangat cepat menyebar dan viral di media sosial. Dalam hal ini, Rebecca Klopper sebagai korban melaporkan kasus ini kepada pihak kepolisian pada tanggal 22 Mei 2023 (Naibaho, 2023). Dilansir dari Kompas.com, Bareskrim Polri menangkap pelaku pada 1 September 2023 dan diketahui bahwa pelaku tersebut adalah Bayu Firlen. Setelah diusut lebih lanjut diketahui bahwa Rebecca Klopper dan Bayu Firlen tidak saling mengenal. Dalam hal ini, Bayu Firlen menyebarkan video seksual non konsensual tersebut untuk diperjualbelikan dan meraup keuntungan hingga Rp 50.000.000.

Video seksual non konsensual yang tersebar tersebut menjadikan nama Rebecca Klopper pembicaraan warganet di media sosial X. Dilansir dari Liputan6.com, per tanggal 24 Mei 2023, kata kunci “*becca*” yang merujuk pada nama panggilan Rebecca Klopper menjadi *trending topic* nomor satu di Indonesia dengan jumlah mention lebih dari 36.000. Salah satu akun X yang mendapatkan banyak perhatian dari para pengguna terkait kasus NCII Rebecca Klopper, yaitu akun @*sosmedkeras*. Dalam hal ini, akun @*sosmedkeras* merupakan akun hiburan

pada media sosial X yang dikelola oleh admin dan biasanya mengunggah kejadian viral untuk kemudian dibicarakan oleh banyak orang. Dalam kaitannya dengan penelitian ini, akun @sosmedkeras mengunggah konten kasus NCII Rebecca Klopper yang kemudian mendapatkan banyak impresi hingga 3,1 juta *views*, 8.600 *likes* dan 815 komentar.

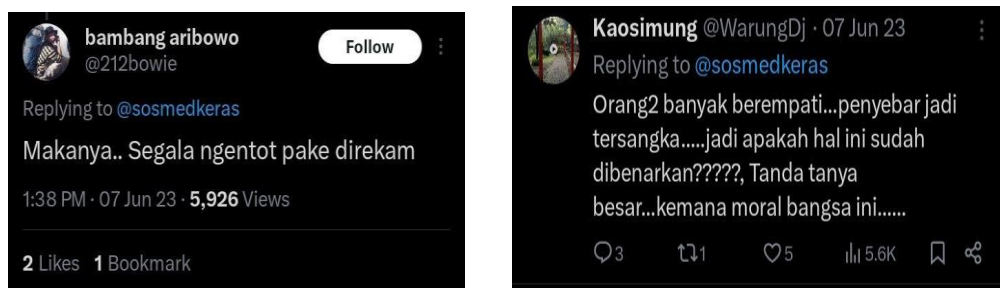


Gambar 1. 3 Pemberitaan Kasus Rebecca Klopper di Media Sosial X
Sumber: Sosmedkeras, 2023

Berbagai konten seksual non konsensual dapat menyebar dengan mudah di X, meskipun memasukkan istilah kemudahan dalam berkomentar dan melakukan interaktivitas di media sosial menjadikan masyarakat memiliki kebebasan dalam memandang dan menanggapi kasus NCII. Secara khusus, interaktivitas dalam media sosial X dapat dilakukan melalui *post*, *mention*, *reply*, *like*, *repost*, *quotes*, *polling*, *direct messages*, dan *hashtag*. Interaktivitas antar pengguna yang terbangun tersebut memungkinkan mereka untuk menjadi suatu bagian dari komunitas virtual dan menciptakan suatu diskusi yang dapat menggiring opini publik terkait kasus

NCII. Kemudahan interaktivitas dalam media sosial X dan karakter interaksi pengguna X yang cenderung terbuka dan bebas memunculkan berbagai macam reaksi dari masyarakat tanpa menyadari adanya perbedaan persepsi dan nilai dalam menanggapi kasus NCII dari masing-masing individu.

Wacana kasus Rebecca Kloper pada unggahan akun X @sosmedkeras mendapatkan interaktivitas yang tinggi dan mendapatkan berbagai macam tanggapan dari warganet. Adapun demikian, ironisnya Rebecca Klopper sebagai korban kasus NCII mendapatkan tindakan *victim blaming* dari masyarakat. Dalam hal ini, *victim blaming* dilakukan melalui komentar- komentar di media sosial X.



**Gambar 1. 4 Komentar *Victim Blaming* dalam Kasus NCII
Sumber: Sosmedkeras, 2023**

Melalui komentar tersebut, masyarakat menormalisasi tindakan NCII kepada korban dan menganggap bahwa tindakan tersebut merupakan dampak kesalahan dari perilaku korban dengan adanya ketersediaan melakukan perekaman dan hubungan intim. Selain itu, komentar *victim blaming* juga kerap dilakukan karena alasan seperti tidak adanya harga diri sebagai perempuan atau pakaian perempuan yang dianggap “mengundang”. Dalam menanggapi kasus NCII ini ditemukan juga

komentar yang menolak untuk mengakui status Rebecca Klopper sebagai korban dari kasus NCII (*Non-Consensual Dissemination Intimate Images*).



Gambar 1. 5 Komentar Menolak Mengakui Rebecca Klopper sebagai Korban NCII
Sumber: Sosmedkeras, 2023

Tiap individu memproduksi dan memaknai unggahan tersebut dengan persepsi dan nilai yang mereka yakini masing-masing, sehingga banyak makna atau narasi yang terjadi dibalik interaktivitas unggahan akun @sosmedkeras terkait kasus NCII Rebecca Klooper. Dalam hal ini, interaktivitas komentar *victim blaming* dalam unggahan akun @sosmedkeras menjadi hal yang menarik untuk diteliti karena memiliki berbagai makna dan alasan dibaliknya serta secara tidak langsung menunjukkan kecenderungan nilai dan kesadaran sosial masyarakat terhadap korban dan kasus NCII.

1.2 Rumusan Masalah

Kemunculan media sosial membawa ruang baru di mana masyarakat dapat berekspreksi dan berinteraksi dengan bebas tanpa terbatas oleh ruang dan waktu. Melalui media sosial, seseorang juga dapat menjadi produsen sekaligus konsumen

informasi (Rachman, 2017). Adapun demikian, ruang baru tersebut atau disebut sebagai *cyberspace* ini menjadi permasalahan di masyarakat ketika terjadi penyalahgunaan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Tidak jarang *cyberspace* digunakan sebagai penyebaran media konten nonkonsensual, hoax, menyebarkan kebencian, pencemaran nama baik atau bahkan menghakimi orang lain secara sepihak tanpa tahu fakta yang sebenarnya. Interaksi yang cenderung tidak terbatas memungkinkan para pengguna menyampaikan pendapat dan berkomentar secara bebas sehingga seringkali hal ini justru menimbulkan permasalahan baru.

Dalam penelitian ini ditunjukkan permasalahan bahwa media sosial dan kemudahan interaktivitas yang di dalamnya justru membawa dampak negatif dengan adanya penyebaran konten seksual nonkonsensual berupa video dan foto yang mengatasnamakan Rebecca Klopper. Berdasarkan sudut pandang hukum dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), NCII juga termasuk ke dalam kasus kekerasan seksual. Oleh karena itu, korban memiliki hak untuk mendapatkan penanganan, perlindungan, dan pemulihan. Hak tersebut misalnya seperti 1) memberikan persetujuan atas informasi yang ditampilkan di internet; 2) hak untuk meminta ganti rugi; 3) hak untuk penghapusan informasi dan konten yang merugikan korban (Christianto, 2020).

Selain itu, posisi Rebecca Klopper sebagai korban juga seharusnya mendapatkan dukungan dari masyarakat atas tindakan yang menimpa dirinya. Adapun demikian pada kenyataannya, korban justru mendapatkan tekanan sosial dan tidak diperlakukan sebagaimana mestinya. Posisi korban menjadi semakin

tertekan ketika konten seksual non konsensual tersebut viral dan memunculkan permasalahan baru, yaitu *victim blaming*. Tak hanya itu, unggahan akun @sosmedkeras dengan narasinya yang berjudul “*Rebecca Klopper Minta Maaf Atas Kegaduhan yang Terjadi terkait Video yang Diduga Mirip Dirinya*” menunjukkan tidak adanya keberpihakan kepada korban. Unggahan tersebut menekankan pada narasi permintaan maaf korban, ekspresi menyesal korban dan kekasihnya yang tidak memiliki kaitan dengan kasus tersebut. Hal ini secara tidak langsung menggiring opini bahwa Rebecca Klopper adalah pihak yang bersalah akan tetapi tetap mendapatkan perlindungan dan kesetiaan dari kekasihnya. Hal ini juga memberikan kecenderungan masyarakat yang lebih berempati kepada kekasih korban dibandingkan korban itu sendiri. Tindakan *victim blaming* terhadap kasus NCII Rebecca Klopper ditunjukkan dalam berbagai komentar seperti @kojaaack: “*ngewe-ngewe aja gausa direkam apa susahnya sih*”, dan @Virgiawan_van: “*Bikin tanda bukti pas waktu putus cewenya kaga bisa ngelak...skrang bnyak cewek sok2an suci udah senior tp pura2 lugu polos jika ketemu jantan yg lebih tajir...*”.

Komentar *victim blaming* merupakan perbuatan yang tidak etis sebab dapat menimbulkan trauma sekunder kepada korban dan melanggengkan diskriminasi yang ada. Berbagai bentuk komentar *victim blaming* seperti *bullying*, *slutshaming*, tuduhan tidak berdasar dan lain sebagainya juga dilarang dalam Pasal 27A UU 1/2024 yang berbunyi “*Setiap orang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk Informasi Elektronik dan/atau Dokumen*

Elektronik yang dilakukan melalui Sistem Elektronik. Dalam hal ini, bagaimana warganet berkomentar menunjukkan sentimen masyarakat terkait kasus NCII dan secara tidak langsung memiliki pengaruh dalam gerakan publik dan solusi hukum.

Tingginya interaktivitas dan makna di balik komentar *victim blaming* dalam unggahan akun @*sosmedkeras* tersebut menunjukkan bahwa adanya stereotipe dan ketidakadilan gender pada korban kasus NCII, khususnya korban perempuan. Jika ditelisik lebih jauh, hal ini berkaitan dengan budaya patriarki yang mengakar kuat pada masyarakat Indonesia dan menjadikan perempuan korban NCII harus menghadapi standar ganda masyarakat, misalnya seperti menyalahkan pakaian yang dikenakan, latar belakang korban, *slutshaming* dan lain sebagainya.

Budaya patriarki seakan menempatkan perempuan sebagai pihak inferior dan laki-laki sebagai pihak superior yang lebih berkuasa. Secara sadar atau tidak, hal ini memberikan konstruksi dan pola pikir bahwa laki-laki memiliki ego maskulinitas yang kuat dan berkuasa, sedangkan perempuan dikaitkan dengan feminitas yang lemah atau diabaikan. Dalam *victim blaming*, laki-laki dianggap wajar sebagai pihak yang agresif secara seksual, sedangkan perempuan dianggap sebagai objek seksual tersebut. Oleh karena itu, jika perempuan bersikap agresif secara seksual atau dianggap tidak sesuai 'standar dan moralitas' masyarakat, maka mereka mendapatkan label negatif dan dijadikan sebab dari kasus kekerasan seksual yang diterimanya (Sakina & Dessy, 2017).

Lebih lanjut, komentar *victim blaming* dan lingkungan yang seksis membuat korban mendapatkan reviktimisasi dan menjadikan korban lainnya enggan untuk

berbicara terkait pengalamannya karena takut akan respon negatif yang diterima (Wulandari & Hetty, 2020). Oleh karena itu, pemahaman akan interaktivitas dan klasifikasi komentar *victim blaming* dari warganet terhadap kasus NCII menjadi penting untuk dapat meningkatkan pemahaman terkait kasus KBGO dan mewujudkan lingkungan digital yang aman bagi korban. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka peneliti akan membatasi penelitian ini untuk mengidentifikasi interaktivitas antar warganet terhadap kasus NCII Rebecca Klopper di media sosial X.

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk, 1) mendeskripsikan interaktivitas dalam kolom komentar antar pengguna media sosial X dalam menanggapi kasus NCII Rebecca Klopper; 2) memahami klasifikasi bentuk komentar *victim blaming* yang dilakukan oleh pengguna media sosial X terhadap kasus NCII Rebecca Klopper selama periode bulan Mei sampai dengan bulan Juli 2023.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Secara Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap teori interaktivitas dalam *new media* dan memberikan kebaruan tentang kajian *victim blaming* terhadap perempuan korban KBGO.

1.4.2 Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan layanan dan dukungan kepada Rebecca Klopper atau korban KBGO lainnya. Selain itu, penelitian ini juga

diharapkan dapat memberi sumbang saran kepada pemerintah dan penegak hukum untuk dapat lebih memperhatikan dan melindungi korban kekerasan seksual di dunia siber.

1.4.3 Secara Sosial

Penelitian ini diharapkan mampu mengkritik norma dan sikap masyarakat yang memicu kekerasan seksual, seperti budaya patriarki, misoginis, dan *victim blaming*. Selain itu, diharapkan juga penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap fenomena *victim blaming* dan dapat menumbuhkan budaya yang lebih suportif bagi korban di masa depan.

1.5 Kerangka Pemikiran Teoritis

1.5.1 Paradigma Penelitian

Paradigma yang digunakan dalam penelitian ini yaitu paradigma kritis. Dalam hal ini paradigma kritis merupakan pendekatan ilmu sosial dan humaniora yang digunakan untuk menganalisis dan memahami adanya konflik sosial, penindasan dan ketimpangan dalam distribusi kekuasaan di masyarakat. Lawrence Neuman (2003) berasumsi bahwa penelitian dengan paradigma kritis bertujuan untuk mengubah realitas yang tidak seimbang dan terdominasi. Dalam hal ini, penelitian memberikan kritik dan transformasi relasi sosial sehingga dapat terwujudnya alternatif positif atau perubahan yang lebih baik dalam tatanan kehidupan dan struktur sosial di masyarakat .

Littlejohn (2016) mengemukakan bahwa terdapat tiga karakter utama dalam paradigma kritis, yaitu 1) paradigma kritis berusaha untuk dapat memahami sistem

baku yang diterima masyarakat, termasuk struktur kekuasaan, kepercayaan dan ideologi dominan di masyarakat. Dalam hal ini, paradigma kritis berfokus pada pihak siapa yang mendapatkan keuntungan dari struktur kekuasaan yang ada serta kelompok masyarakat mana yang boleh dan tidak boleh untuk berbicara; 2) berusaha untuk menunjukkan adanya bentuk penindasan sosial dan memberikan alternatif dalam pengaturan kekuasaan; 3) memadukan teori normatif untuk dapat diimplementasikan dalam kehidupan masyarakat. Setiap tahap penelitian dengan paradigma kritis akan saling berkaitan dan berpengaruh terhadap tahapan lainnya sehingga antara perspektif, teori, dan metode penelitian membentuk garis kontinum yang mensyaratkan relevansi, konsistensi, dan sistematis (Halik, 2018).

1.5.2 State of The Art

Penelitian serupa terkait *victim blaming* pada korban kekerasan seksual di media sosial dilakukan oleh Sri Astuti, Dyah Pradoto dan Gustina (2019) dalam penelitiannya yang berjudul *Victim Blaming Kasus Pelecehan Seksual (Studi Netnografi Pelecehan Seksual Terhadap Via Valen di Instagram)*. Penelitian ini menggunakan pendekatan netnografi dengan tujuan untuk memetakan *victim blaming* yang dialami oleh Via Vallen atas kasus pelecehan seksual yang menyimpannya. Peneliti menggunakan komentar dalam Instagram @lambeturah untuk mengetahui bagaimana tanggapan netizen terkait kasus tersebut. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa banyak netizen yang melakukan *victim blaming* terhadap Via Vallen yang merupakan korban pelecehan seksual.

Peneliti dalam hal ini melakukan kategorisasi komentar menjadi empat bagian, yaitu sebagai berikut:

1) Netizen yang menyalahkan penampilan

Dalam hal ini netizen mengkaitkan penampilan Via Vallen dengan pelecehan seksual yang diterimanya. Penampilan Via Vallen dianggap “memancing” pelaku sehingga dianggap wajar atau pantas menerima adanya tindak pelecehan seksual

2) Netizen yang menganggap wajar pelaku pelecehan seksual karena adanya perbedaan budaya

Dalam hal ini netizen menganggap wajar adanya pelecehan seksual jika hal tersebut dilakukan oleh mereka dengan latarbelakang budaya barat

3) Netizen yang menganggap bahwa mengungkap kasus pelecehan seksual hanyalah usaha mencari sensasi

Posisi Via Vallen sebagai publik figur menjadikan posisinya semakin tersudutkan karena adanya anggapan bahwa mengungkapkan pelecehan seksual bukanlah hal yang penting, melainkan hanyalah sebuah cara yang digunakan Via Vallen untuk mencari sensasi dan perhatian publik.

4) Netizen yang setuju dan mengizinkan perempuan untuk menjadi objek pelecehan seksual

Dalam hal ini adanya relasi gender dan dominasi seksual laki-laki yang lebih tinggi daripada perempuan menjadikan sebagian netizen beranggapan bahwa sudah menjadi hal yang biasa atau bahkan laki-laki dianggap normal secara seksualitas karena adanya tindakan objektifikasi tubuh perempuan yang dilakukannya.

Penelitian dengan media sosial sebagai objek penelitiannya juga dilakukan oleh Rahmalia Sulistyawati dan Aprilia Firmonasari (2020) dengan judul *Realita Sosial di Sekitar Wacana Kasus Kekerasan Seksual Akun @Tt_Guillaume*. Metode penelitian yang digunakan yaitu kajian analisis wacana kritis Norman Fairclough. Dalam hal ini penelitian membahas terkait tuturan korban kekerasan seksual di media sosial twitter yang mengungkapkan pengalamannya. Peneliti melakukan analisis pada interaktivitas akun twitter akun @Tt_Guillaume kemudian diketahui bahwa unggahan akun twitter @Tt_Guillaume memiliki keterkaitan dengan kondisi sosial masyarakat Prancis dimana kekerasan seksual berbasis gender menjadi masalah kultural dan institusional di Prancis. Peneliti mengungkapkan bahwa unggahan akun @Tt_Guillaume mendapatkan banyak perhatian masyarakat dan memunculkan banyak tuturan-tuturan lainnya terkait kasus kekerasan seksual. Dalam hal ini interaktivitas antar pengguna twitter berbentuk komentar dan balasan pada unggahan akun @Tt_Guillaume. Lebih lanjut, diketahui juga bahwa wacana yang dibangun oleh akun @Tt_Guillaume berperan besar sebagai media *speak up* dan upaya dalam memperoleh kebebasan berpendapat sebagai korban kekerasan seksual. Hal ini dapat mendorong korban kekerasan seksual lainnya untuk dapat berani berbicara dan berupaya mendapatkan keadilan.

Penelitian yang berfokus pada interaktivitas pengguna media sosial dikaji oleh Arlina Laras, Triyono Lukmantoro dan Adi Nugroho (2022) dalam penelitiannya yang berjudul *Interaktivitas Dalam Cuitan Akun Twitter Partai Politik @Gerindra Pada Kasus Pemerkosaan "Semua Kembali Lagi Pada Keluarga Korban"*. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian kualitatif dengan

metode analisis Van Dijk yang meliputi analisis struktur makro, superstruktur dan struktur mikro. Dalam hal ini dijelaskan bahwa partai politik Gerindra menggunakan media sosial X (twitter) sebagai media untuk melakukan klarifikasi atau tanggapan terhadap kasus pemerkosaan yang melibatkan kader partai Gerindra sebagai tersangkanya. Melalui akun X resminya, partai Gerindra mengunggah pernyataan “*Semua kembali lagi kepada keluarga korban. Apakah ingin melanjutkan kasus ini secara hukum atau mengambil langkah atau pilihan lain.*” Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa interaktivitas warganet ditunjukkan melalui fitur komentar dan *quote* pada akun X resmi partai Gerindra. Selain itu, diketahui juga tanggapan akun @Gerindra terhadap kasus pemerkosaan tersebut menimbulkan banyak sentimen negatif di kalangan warganet dan menghasilkan pemaknaan teks bahwa partai Gerindra telah melakukan pelanggaran bias gender dimana hal ini dapat memengaruhi citra politik dan tingkat elektabilitas partai.

Penelitian serupa lainnya yang berfokus pada interaktivitas pengguna media sosial juga dilakukan oleh Dinan Ekantoro dan Alila Pramiyanti (2022) dalam penelitiannya yang berjudul *Magdalene Instagram Followers Interactivity on Gender Equality Issues (Virtual Ethnography Study on Instagram Followers @magdaleneid in #komikceritaindah content)*. Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan etnografi virtual untuk mengetahui bagaimana para followers Instagram @magdaleneid berinteraksi dalam menanggapi konten #komikceritaindah. Dalam hal ini ditemukan bahwa interaksi yang tercipta antar pengguna bersifat timbal balik dan membangun diskusi baru terkait kesetaraan gender. Selain itu ditemukan juga bentuk interaktivitas dalam

bentuk *likes*, *comments*, dan *shares* pada postingan konten instagram @magdaleneid. Audiens dalam hal ini memiliki kebebasan dan kontrol sepenuhnya dalam menanggapi konten, baik dalam bentuk *emoticon*, memberikan pendapat atau bahkan berbagi cerita tentang pengalaman pribadi mereka.

Lebih lanjut, Nunung Prajarto (2022) melakukan kajian interaktivitas pengguna media sosial instagram dalam penelitiannya yang berjudul *Netizen dan Infotainment: Studi Etnografi Virtual pada Akun Instagram @lambe_turah*. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi etnografi virtual yang bertujuan untuk memahami aktivitas pengguna, sentimen yang muncul dan peranan netizen dalam akun instagram @lambe_turah. Guna dapat mencapai tujuan penelitian, peneliti menganalisis komentar pada akun Instagram @lambe_turah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa netizen tidak hanya berperan sebagai objek penerima informasi, melainkan juga sebagai produsen informasi dan reproduksi konten. Melalui kolom komentar, netizen kerap kali menambahkan informasi baru yang belum ada pada postingan konten @lambe_turah dan menciptakan diskusi baru antar pengguna. Dalam hal ini netizen menjadi kunci utama dalam media infotainment dengan perannya yang sekaligus sebagai pemberi, pelengkap dan penyanggah informasi. Selain itu, penelitian ini juga mengungkapkan bahwa penyebaran pesan cenderung bersentimen negatif yang diungkapkan dalam bentuk sarkasme atau hujatan terhadap publik figur yang diberitakan.

Berbeda dengan beberapa penelitian terdahulu tersebut, penelitian ini secara khusus mengangkat fenomena *victim blaming* pada media sosial X dan kasus

NCII Rebecca Klopper sebagai fokus dalam penelitiannya. Dalam hal ini akan dilakukan analisis interaktivitas pengguna media sosial X terhadap kasus NCII Rebecca Klopper untuk mendapatkan jawaban permasalahan penelitian.

1.5.3 *New Media Theory*

Gagasan *new media* muncul pada tahun 1980-an dan memperkenalkan perubahan penting dalam media. Dalam hal ini konsep media tidak hanya sebatas komunikasi massa, namun mencakup berbagai jenis media komunikasi baik media massa atau pun media komunikasi personal. Perubahan media ini didukung dengan munculnya penggunaan komputer, tablet, *smartphone*, internet dan lain sejenisnya. (Littlejohn, 2016). *New media* dapat dimaknai sebagai media online yang berbasis teknologi, fleksibel dan interaktif serta dapat berfungsi secara publik ataupun privat dengan menggunakan internet (Mondry, 2008). Kehadiran *new media* membawa banyak perubahan, mulai dari perubahan cara masyarakat saling berkomunikasi, perubahan dalam menerima informasi, hingga perubahan dalam aspek sosial, ekonomi dan politik.

New media dalam hal ini memunculkan enam aspek baru yang menjadikannya berbeda dengan *old media* (Holmes, 2005), yaitu sebagai berikut:

1) Decentred

Awalnya pada *old media*, sumber media bersifat terpusat. Kemudian terdapat perubahan pada *new media* yang menyediakan media interaktif dan sumber informasi yang banyak sehingga pesan juga dapat tersebar secara lebih luas

2) *Two way communication*

Dalam *new media*, komunikasi dapat dilakukan secara dua arah dan bersifat timbal balik. Dalam hal ini masyarakat tidak hanya bersifat pasif dalam menerima informasi, tetapi juga dapat memberikan komentar dan membentuk komunikasi interaktif terkait informasi tersebut dengan pengguna lainnya

3) *Beyond state control*

Pada aspek bisnis dan kuasa media, Holmes (2005) mengemukakan bahwa *new media* memunculkan berbagai alternatif saluran media yang menjadikan penguasaan terhadap sumber-sumber informasi tersebut menjadi semakin kecil untuk dilakukan. Selain itu, *new media* juga memungkinkan adanya kebebasan khalayak untuk melakukan kontrol terhadap sumber informasi.

4) *Democratizing*

New media memberikan kemudahan masyarakat untuk menggunakan media sebagai ruang publik. Melalui media interaktif, masyarakat dapat menyampaikan pendapat dan kritik serta melakukan kontrol sosial untuk mencapai kesadaran dan kesetaraan dalam strata sosial.

5) *Promoting individual consciousness*

New media memungkinkan konten media yang bebas dan khalayak dapat membuat atau mengakses konten sesuai dengan kebutuhan dan keinginan masing-masing.

6) *Individually oriented*

New media memungkinkan khalayak dapat melibatkan diri mereka terhadap pesan yang disampaikan oleh media. Misalnya dapat membandingkan informasi dalam suatu media dengan media lainnya atau melakukan pengecekan kebenaran data-data dalam informasi yang diterima.

David Holmes (2005) dalam *Communication Theory* menjelaskan bahwa terdapat dua pendekatan dalam teori *new media*. Pendekatan pertama, yaitu *social interaction approach* yang membedakan media berdasarkan kedekatannya dengan interaksi tatap muka. Berbeda dengan *old media* yang bersifat publik, *new media* memberikan jenis interaksi baru yang bersifat personal. Misalnya seperti pertukaran pesan melalui media sosial facebook, dalam hal ini komunikasi dikirimkan secara personal seperti interaksi tatap muka. Namun, dalam waktu yang sama komunikasi ini juga dimediasi oleh perangkat media komunikasi. Kemudian, pendekatan kedua disebut dengan *social integration approach* yang menjelaskan bahwa media menjadi sebuah kebiasaan dan memiliki nilai yang lebih besar daripada penggunaan media itu sendiri. Pendekatan ini berfokus pada bagaimana individu menggunakan media sebagai cara mereka dalam membentuk suatu komunitas di masyarakat. Dalam hal ini, media tidak hanya dipandang sebagai sebuah instrumen informasi, melainkan juga cara untuk menyatukan masyarakat dan memberikan rasa saling memiliki (*sense of belongings*).

Kehadiran *new media* saat ini sudah menjadi hal yang sangat awam dan diperlukan kegunaannya di kehidupan sehari-hari masyarakat. Misalnya adalah seperti *smartphone*, internet, media sosial, *podcast*, *blogging*, *virtual reality*, situs

berita online dan lain sebagainya. Flew dan Smith (2018) berpendapat bahwa konsep utama pemahaman dari *new media* adalah adanya suatu kemampuan untuk memberikan interaktivitas kepada pengguna. Dalam hal ini, *new media* memungkinkan pengguna untuk dapat memilih informasi apa saja yang ingin ditampilkan. Selain itu, pengguna juga dapat secara aktif membaca sekaligus menulis dan mempublikasikannya kepada khalayak umum, misalnya melalui platform media sosial. Individu yang mengunggah sesuatu pada laman media sosial mereka akan mendapatkan tanggapan dari pengguna lain dalam bentuk komentar atau ruang *chat* tertutup seperti *direct message*, sehingga terjadilah komunikasi interpersonal. Adapun pada saat yang sama unggahan oleh pengguna tersebut dapat dilihat oleh khalayak umum secara bebas. Oleh karena itu, media sosial menjadikan komunikasi interpersonal dan komunikasi massa melebur menjadi satu (Watie, 2016).

Media sosial X merupakan salah satu jejaring sosial yang populer di berbagai kalangan masyarakat. Pada awalnya X atau dulu disebut sebagai twitter dibuat sebagai layanan pesan pendek terbatas untuk berkomunikasi (Elcom, 2010). Sebagai *new media*, berbagai kegiatan yang dilakukan melalui X merupakan proses komunikasi manusia yang dimediasi oleh komputer dengan konteks dan tujuan tertentu. Media sosial X mengharuskan pengguna untuk mendaftar dan membuat akun untuk dapat menggunakan fitur secara lebih leluasa, seperti mengunggah tulisan, foto atau video, berkomunikasi melalui fitur pesan singkat (*direct messages*), berkomentar dan lain sebagainya. Sedangkan untuk pengguna tak terdaftar hanya dapat melihat konten unggahan pada X tanpa bisa melakukan

interaktivitas lainnya. Selain sebagai media informasi, X juga banyak digunakan oleh pengguna untuk membangun jaringan pertemanan dan bersosialisasi antar sesama pengguna.

1.5.4 Teori Interaktivitas

Interaktivitas erat kaitannya dengan *new media*. Dalam hal ini interaktivitas menjadi konsep utama dalam *new media* yang membedakannya dengan *old media*. Dalam *old media*, komunikasi antarpengguna hanya dapat terjadi secara satu arah (*one way communication*). Konsep interaktivitas secara umum dapat dimaknai sebagai kemampuan komunikasi antarpengguna yang terjadi dengan adanya bantuan komputer (Dillon and Leonard, 1998). Lebih lanjut, Rafaeli dan Sudweeks (1997) berpendapat bahwa interaktivitas merupakan kemampuan sistem komunikasi untuk bertukar pesan di antara para pengguna. Dalam hal ini, suatu media dapat dikatakan interaktif jika media tersebut memfasilitasi terjadinya umpan balik dua arah dalam komunikasi. Kioussis (2002) mengemukakan bahwa interaktivitas perlu mempertimbangkan aspek sejauh mana teknologi komunikatif dapat menciptakan konteks yang memungkinkan para pengguna dapat berkomunikasi secara efektif. Interaktivitas tidak hanya dapat saling memberikan umpan balik, interaktivitas dalam *new media* juga memungkinkan pengguna untuk dapat mengontrol pesan yang ingin dikirimkan atau diterima dari pengguna lainnya.

McMillan (2006) membagi pola interaktivitas antara manusia dengan komputer menjadi tiga, yaitu:

1) *User to system*

Pola interaktivitas ini dimaknai sebagai interaksi antara manusia dengan komputer melalui teknologi web. Dalam hal ini komunikasi bersifat satu arah, yaitu pengguna hanya dapat berinteraksi melalui fitur yang ada, misalnya mengunjungi tautan link website atau memberikan *vote* pada fitur *polling*.

2) *User to User*

Pola ini dimaknai sebagai konsep interaktivitas yang terjadi antar pengguna atau pengguna dengan pengelola situs (admin). Konsep ini biasanya terdapat pada fitur *chatting* atau *direct message* yang dapat digunakan oleh pengguna untuk bertukar pesan satu sama lain.

3) *User to document*

Pola interaktivitas ini terjadi antara pengguna dengan dokumen yang mereka terima. Konsep ini memungkinkan pengguna untuk terlibat aktif dalam memahami dan menginterpretasi dokumen menjadi sebuah pesan. Menurut Dillon dan Leonard (1998), konsep interaktivitas *user to document* melibatkan penciptaan ulang informasi yang dilakukan oleh pengelola website atau akun (admin).

Lebih lanjut, menurut Lev Manovich (2002) dalam *The Language of New Media* menjelaskan terdapat dua tipologi dalam interaktivitas pada *new media*, yaitu tipe terbuka dan tipe tertutup. Pada tipe terbuka, pengguna memiliki kebebasan sepenuhnya untuk dapat menentukan bagaimana interaksi akan terjadi. Contohnya seperti pada fitur kolom komentar, *reply*, forum diskusi dan edit postingan.

Sedangkan pada tipe tertutup, interaktivitas pengguna lebih terbatas dan hanya memiliki sedikit kontrol atas media yang digunakannya. Dalam hal ini pembuat situs web atau media memiliki kuasa penuh untuk mengontrol dan mengarahkan bagaimana interaktivitas para pengguna dapat berjalan. Contohnya yaitu terdapat pada *video game*.

1.5.5 *Victim Blaming*

Para psikolog sosial telah meneliti kecenderungan untuk menyalahkan perempuan korban kekerasan seksual sejak tahun 1970-an. *Victim blaming* merupakan suatu tindakan merendahkan martabat yang terjadi ketika korban kejahatan dianggap bertanggung jawab atas kejahatan yang menimpa mereka. William Ryan dalam *Blaming the Victim* (1971) mengemukakan bahwa konsep *victim blaming* digunakan sebagai sebuah cara oleh kelompok penguasa untuk dapat mempertahankan kepentingan mereka. Dalam hal ini, tanggapan *victim blaming* seringkali didasarkan pada kesalahpahaman atau asumsi tidak berdasar yang ditujukan kepada korban. Akibatnya, masyarakat pelaku *victim blaming* meyakini bahwa tindak kejahatan tersebut adalah tindakan yang pantas diterima oleh korban. Fenomena ini didukung oleh Melvin (1980) dalam hipotesisnya tentang *Just World Beliefs* mengemukakan bahwa adanya dunia yang adil didasarkan pada keyakinan bahwa individu pantas mendapatkan apa yang mereka dapatkan. Hal ini juga kerap dijumpai dalam kehidupan sehari-hari dengan kalimat “*orang baik akan mendapatkan hal yang baik dan orang jahat akan mendapatkan hal yang buruk*”. Oleh karena itu, individu dengan keyakinan *Just World Beliefs*

akan memandang bahwa menjadi korban dan tertimpa kemalangan adalah hal yang pantas diterima sebagai akibat dari tindakan mereka sendiri.

Dalam penelitian ini, konsep *victim blaming* erat kaitannya dengan kasus NCII sebagai tindak kekerasan berbasis gender online (KBGO). Dalam hal ini, *victim blaming* pada perempuan korban NCII dapat berbentuk seperti tidak dipercayainya cerita korban, merendahkan tingkat serangan atau kejahatan yang diterima korban, menyalahkan korban, mengobjektifikasi tubuh perempuan korban, serta anggapan normalisasi kekerasan seksual. Tak hanya itu, masyarakat juga semakin menyudutkan posisi korban dengan mempertanyakan korban terkait bagaimana gaya hidupnya, bagaimana cara berpakaian, apa dan sejauh mana hubungan dengan pelaku dan lain sebagainya. Seringkali pertanyaan tersebut digunakan untuk memenuhi rasa penasaran dan memunculkan asumsi tidak berdasar terhadap korban. Campbell dan Raja (1999) berpendapat bahwa tanggapan *victim blaming* dapat dilakukan oleh berbagai macam pihak, seperti media, keluarga, lingkungan pertemanan, dan bahkan pihak instansi seperti kepolisian, ahli hukum atau tenaga medis.

Kelly (2009) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa pihak laki-laki cenderung lebih menyalahkan perempuan korban kekerasan seksual. *Victim blaming* dapat dipahami sebagai respons terhadap ancaman status quo (Stahl et al., 2010). Secara sadar atau tidak, masyarakat Indonesia masih cenderung dengan budaya patriarki yang menempatkan posisi perempuan di bawah laki-laki. Perempuan dalam masyarakat Indonesia mendapatkan banyak susunan aturan terkait bagaimana mereka harus bersikap, berbusana, berbicara dan berpikir sesuai

dengan jenis kelamin mereka. Davies dan Rogers (2006) berpendapat bahwa perempuan korban kekerasan seksual biasanya disalahkan karena adanya pembawaan karakter korban berupa kepribadian, sifat, watak dan tingkah laku dalam kehidupan sehari-hari, misalnya seperti sifat perempuan yang ceroboh atau terlalu mudah percaya. Dalam kasus NCII, alasan ketersediaan korban dalam melakukan hubungan seksual kerap kali menjadikan masyarakat mewajarkan adanya distribusi konten seksual non konsensual oleh pelaku. Hal ini dapat menimbulkan anggapan normalisasi pelecehan seksual dan anggapan bahwa perempuan korban pelecehan seksual tidak perlu mendapatkan perlindungan sebagai akibat dari perilaku mereka sendiri.

Lebih lanjut menurut George dan Martinez (2002), masyarakat cenderung akan lebih menyalahkan korban ketika pelaku kekerasan seksual dan korban saling mengenal atau berhubungan satu sama lain. Hal ini karena adanya asumsi bahwa kejadian yang menimpa tersebut dapat dihindari. Misalnya seharusnya korban lebih awal memutuskan hubungan dengan pelaku atau tidak setuju dalam melakukan kegiatan seksual tersebut. Fenomena *victim blaming* dapat menimbulkan berbagai macam dampak negatif kepada korban, yaitu seperti tekanan dampak psikologis yang sangat besar hingga depresi, dikucilkan dari masyarakat sosial, pencemaran nama baik hingga mempengaruhi keputusan korban di masa depan. Dalam *victim blaming*, korban disalahkan dan harus bertanggung jawab atas kejahatan yang dilakukan orang lain terhadap dirinya. Oleh karena itu, korban akan cenderung menutup diri dan tidak melaporkan kasus serupa lebih lanjut.

1.6 Operasionalisasi Konsep

1.6.1 Interaktivitas Media Sosial X

Interaktivitas dalam penelitian ini merujuk pada bagaimana para pengguna saling terlibat dan sejauh mana komunikasi dapat dilakukan melalui media sosial X. Berbagai bentuk interaktivitas dalam media sosial X dapat dilihat melalui *post*, *mention*, *reply*, *like*, *repost*, *quote*, *polling*, *direct messages*, dan *hashtag* yang dilakukan oleh para pengguna. Berbagai macam fitur yang disediakan oleh media sosial X, misalnya *post*, *reply* dan *quote* pada postingan akan membentuk sebuah interaksi yang dipahami oleh para pengguna dengan sudut pandang mereka masing-masing (Laras et al., 2022).

1.6.2 *Victim Blaming*

Victim blaming dalam penelitian ini merujuk pada komentar-komentar warganet dalam unggahan akun @*sosmedkeras* yang menyalahkan korban NCII dan menganggap bahwa kasus yang dialami korban tersebut adalah akibat dari tindakannya sendiri. Dalam hal ini, warganet melakukan tindakan *victim blaming* dalam berbagai bentuk, yaitu sebagai berikut:

- 1) Adanya sikap empati yang rendah terhadap korban sehingga tidak adanya dukungan emosional dan kepedulian orang lain terhadap kekerasan seksual yang dialami oleh korban
- 2) Mengomentari kehidupan pribadi korban seperti latar belakang keluarga, pendidikan, atau status ekonomi sebagai alasan normalisasi terjadinya kekerasan seksual terhadap korban

- 3) Mencaci korban dengan kata-kata kasar dan berpendapat bahwa kekerasan seksual yang diterima korban merupakan konsekuensi dari perilaku korban sendiri
- 4) Mengobjektifikasi tubuh korban kekerasan seksual
- 5) Menyalahkan korban dengan pertanyaan seperti, “*mengapa tidak melakukan perlawanan?*”, “*mengapa baru melaporkan kasus sekarang?*”
- 6) Komentar humor dan lelucon yang berkaitan dengan gender, ras, seksualitas, atau aktivitas seksual seseorang dan bertujuan untuk menghina atau merendahkan harga diri korban

1.6.3 *Non-Consensual Dissemination of Intimate Images (NCII)*

Dalam penelitian ini, *Non-Consensual Dissemination of Intimate Images* (NCII) dimaknai sebagai tindakan penyebarluasan konten seksual tanpa persetujuan melalui media sosial X. Tindakan NCII dapat terjadi dalam berbagai bentuk, yaitu 1) rekaman video atau foto konsensual yang disebarluaskan secara nonkonsensual; 2) rekaman video atau foto tersembunyi, dalam hal ini korban tidak mengetahui bahwa dirinya sedang direkam atau difoto, misalnya dengan menggunakan kamera tersembunyi di kamar mandi atau kamar tidur yang disewa; 3) *deepfake porn*, yaitu video atau gambar buatan yang memperlihatkan kegiatan seksual atau bagian tubuh intim seseorang. Video atau foto tersebut direkam menggunakan bantuan teknologi kecerdasan buatan (AI) dengan memasukkan foto seseorang yang

kemudian dapat direkayasa oleh pelaku sebagai konten seksual untuk kemudian disebarluaskan secara luas.

1.7 Asumsi Penelitian

Penelitian ini berasumsi bahwa kasus NCII, khususnya yang dialami oleh Rebecca Klopper menunjukkan bahwa kasus KBGO belum sepenuhnya mendapatkan dukungan dan empati serta masih menjadi hal yang dianggap sebagai konsekuensi atas perilaku korban. Hal ini dapat dilihat melalui berbagai komentar *victim blaming* dalam media sosial X. Adapun demikian, tidak semua warganet memahami dan menyadari bahwa interaktivitas komentar yang dilakukannya termasuk ke dalam tindakan *victim blaming*. Meskipun secara tidak langsung mengatakan bahwa korban adalah pihak yang bersalah, namun ujaran-ujaran seperti mengomentari dan mengejek tubuh korban, memberikan komentar humor terhadap korban, tidak memercayai cerita korban, atau bahkan menikmati video dan foto seksual nonkonsensual yang disebarluaskan termasuk ke dalam tindakan *victim blaming*.

Lebih lanjut, tindakan *victim blaming* ini dilatarbelakangi oleh beberapa alasan, yaitu seperti 1) budaya patriarki yang masih langgeng di masyarakat Indonesia. Dalam hal ini, budaya patriarki menempatkan laki-laki sebagai posisi dominan dan memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan perempuan, termasuk juga laki-laki memiliki hak otoritas terhadap tubuh perempuan yang menempatkan citra perempuan sebagai pemenuh kebutuhan seksual laki-laki, namun tidak dengan sebaliknya; 2) kurangnya pendidikan terkait *sexual behavior*, *sexual violence* dan konsep konsensual. Edukasi seks dianggap tabu oleh sebagian

masyarakat Indonesia sehingga menimbulkan kesalahpahaman terhadap kasus kekerasan seksual dan posisi korban yang kerap kali dianggap sebagai aib;

Kemudian, 3) adanya narasi ketidakberpihakan kepada korban yang ditunjukkan dalam unggahan akun atau *menfess* pada media sosial X. Dalam hal ini digunakan diksi yang cenderung bersifat apatis atau menyalahkan korban; 4) keyakinan masyarakat pada *rape myths*, yaitu *pandangan dan prasangka yang salah tentang pemerkosaan serta korban* dan *just world beliefs*, yaitu keyakinan hidup yang adil. Kedua hal tersebut mendukung terciptanya lingkungan yang menyalahkan korban kekerasan seksual. Kemudian kondisi menjadi semakin ironis ketika komentar *victim blaming* tidak hanya dilakukan oleh laki-laki, namun juga perempuan. Hal ini dapat terjadi karena perempuan, khususnya dalam masyarakat Indonesia, juga terpapar oleh budaya patriarki sehingga secara tanpa sadar mereka terinternalisasi dengan perilaku dalam perspektif maskulin.

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode netnografi, yaitu studi yang berfokus pada pemahaman ruang siber dan digunakan untuk memahami bagaimana individu di dalamnya saling berinteraksi dan berperilaku hingga membentuk budaya dan masyarakat tersendiri di dunia digital (Kozinets, 2010). Metode netnografi merupakan jenis khusus etnografi yang berfokus pada kajian budaya dan komunitas online, sehingga penelitian dapat digunakan dengan berbagai informasi yang tersedia secara publik di berbagai forum online. Hal ini juga didukung oleh pendapat Bowler (2010) yang mengemukakan bahwa netnografi merupakan satu-

satunya metode yang secara khusus dirancang untuk mempelajari kebudayaan dan komunitas online. Metode netnografi menganggap bahwa pengamatan dan interaksi online dapat dinilai sebagai refleksi budaya yang menghasilkan pemahaman (Bakry, 2017). Lebih lanjut, biasanya metode netnografi digunakan untuk mendapatkan pemahaman terkait kehidupan di dunia siber dan pengguna internet di komunitas online.

Penelitian dengan studi netnografi memungkinkan jawaban penelitian didapatkan dari memahami dan menganalisis interaksi serta opini para pengguna di berbagai macam platform secara daring. Melalui hal tersebut penelitian dapat menjangkau keyakinan, ideologi, nilai, budaya dan perilaku dari para pengguna internet terhadap suatu konteks atau kelompok tertentu. Lebih lanjut menurut Kozinets (2010) dalam *Netnography: Doing Ethnographic Research Online*, penelitian netnografi memiliki lima tahap, yaitu:

- 1) *Entree*, yaitu tahap dilakukannya perumusan masalah dan pertanyaan di dalam penelitian. Dalam penelitian dirumuskan permasalahan terkait fenomena komentar *victim blaming* terhadap Rebecca Klopper dan terdapat 2 pertanyaan penelitian yang ingin dijawab, yaitu 1) Bagaimana interaktivitas dalam komentar *victim blaming* antar warganet X dalam menanggapi kasus NCII Rebecca Klopper?; 2) Bagaimana klasifikasi bentuk komentar *victim blaming* yang disampaikan oleh warganet X terhadap kasus NCII Rebecca Klopper?.

- 2) Penetapan situs atau komunitas daring, dalam hal ini dilakukan identifikasi situs atau komunitas online yang sesuai dengan fokus penelitian. Dalam hal ini ditetapkan pengguna media sosial X sebagai komunitas daring yang ingin diteliti.
- 3) Koleksi data, yaitu tahap pengumpulan data dari platform atau komunitas online yang menjadi fokus penelitian. Dalam penelitian ini secara khusus menggunakan proses investigasi untuk mendapatkan data temuan yang relevan dengan penelitian.
- 4) Analisis data, yaitu tahapan yang dilakukan dengan menganalisis data penelitian yang telah terkumpul. Dalam proses analisisnya, metode netnografi menggunakan komunikasi yang dimediasi komputer (internet) sebagai sumber data untuk dapat memahami dan menganalisis fenomena dan interaksi yang terjadi di dunia siber. Dalam penelitian ini dilakukan klasifikasi bentuk komentar *victim blaming* serta analisis teks dan interaktivitas dalam komentar *victim blaming* pada unggahan @*sosmedkeras*.
- 5) Representasi, yaitu tahapan menyajikan hasil penelitian dalam bentuk yang mudah untuk dipahami, misalnya presentasi, grafik, diagram, laporan dan lain sebagainya. Dalam penelitian ini representasi data dilakukan dalam bentuk deskripsi dan interpretasi data menggunakan teori dan konsep yang digunakan dalam bab diskusi.

1.8.2 Jenis Data

Menurut Kozinet (2010), jenis data dalam penelitian netnografi meliputi tiga jenis data, yaitu 1) data arsip merupakan data salinan dalam bentuk gambar, rekaman atau jejak digital dari aktivitas online yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti dengan tujuan untuk mendapatkan tambahan informasi; 2) data elisitasi, yaitu data yang diperoleh melalui pencatatan atau penangkapan interaksi dalam komunitas online. Dalam hal ini, peneliti menciptakan data secara langsung melalui interaksi personal dengan anggota komunitas online, misalnya seperti peneliti mengunggah konten, menulis komentar, *chatting* dan lain sebagainya. ; 3) data lapangan, yaitu data catatan yang ditulis oleh peneliti selama melakukan observasi atau wawancara terkait komunitas online dan interaksi yang terjadi di dalamnya. Secara khusus, penelitian ini menggunakan jenis data arsip yang diperoleh melalui media sosial X. Data arsip yang digunakan berupa komentar-komentar *victim blaming* oleh warganet X terhadap Rebecca Klopper dalam unggahan @*sosmedkeras* pada tanggal 7 Juni 2023.

1.8.1.1 Data Primer

Menurut Lofland dan Lofland (1984), sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata, dan tindakan. Dalam penelitian ini, data primer yang digunakan merupakan komentar-komentar *victim blaming* pengguna X terhadap unggahan kasus NCII Rebecca Klopper dalam akun X @*sosmedkeras* yang diunggah pada tanggal 7 Juni 2023.

1.8.1.2 Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data kedua yang diperoleh secara tidak langsung atau melalui media perantara dari pihak lain. Dalam hal ini, data sekunder dapat diperoleh dari bahan kepustakaan seperti buku, referensi jurnal, dokumen dan artikel yang dapat mendukung sumber primer. Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa media literatur dan dokumentasi pemberitaan terkait fenomena *victim blaming* serta kasus NCII Rebecca Klopper.

1.8.4 Teknik Pengumpulan Data

Secara khusus, penelitian ini menggunakan jenis data arsip yang diperoleh melalui media sosial X. Data arsip pada media sosial berjumlah sangat besar, oleh karena itu dilakukan proses investigasi untuk dapat mengumpulkan data penelitian yang relevan. Dalam hal ini proses investigasi dimaknai sebagai proses mencari hingga memilih data yang relevan dengan penelitian (Kozinets, 2020).

Tahapan proses investigasi meliputi beberapa tahapan sebagai berikut:.

1) Menyederhanakan (*simplifying*)

Tahapan ini merupakan tahapan membuat operasi data untuk menyederhanakan peristiwa yang kompleks, operasi data yang digunakan dalam penelitian netnografi yaitu seperti kata kunci atau *hashtag*. Operasi data tersebut digunakan agar data yang dicari dapat lebih spesifik dan relevan dengan topik penelitian. Dalam penelitian ini digunakan kata kunci "*video syur*", "*victim blaming*" dan "*Rebecca*

Klopper” pada media sosial X untuk menentukan batasan data yang ingin dikumpulkan.

2) Mencari (*searching*)

Setelah ditentukannya operasi data yang sesuai dengan penelitian, maka tahap selanjutnya yaitu menggunakan operasi data tersebut untuk proses pencarian data. Dalam penelitian ini operasi data yang berupa kata kunci “*video syur*”, “*victim blaming*” dan “*Rebecca Klopper*” dicari menggunakan *search bar* (mesin pencarian) pada media sosial X. Dalam hal ini data hasil pencarian dapat berupa teks, gambar, video dan lain sebagainya.

3) Memilah (*scouting*)

Tahapan memilah merupakan tahapan membaca, memeriksa ulang dan memeriksa sumber asli dari data hasil pencarian yang telah ditemukan. Hal ini penting dilakukan agar data yang dikumpulkan merupakan data yang spesifik dan relevan dengan tujuan penelitian. Adapun data-data yang tidak sesuai maka harus dieleminasi. Dalam penelitian ini data-data yang dipilih merupakan data teks berupa komentar-komentar pada akun @*sosmedkeras* terkait kasus NCII Rebecca Klopper. Adapun akun @*sosmedkeras* dipilih karena memiliki impresi yang tinggi dari pengguna media sosial X serta memiliki unggahan yang relevan dengan penelitian, yaitu kasus NCII terhadap Rebecca Klopper.

4) Menyeleksi (*selecting*)

Penelitian netnografi merupakan penelitian yang berfokus pada data yang kecil dan mendalam. Oleh karena itu, data yang sudah dipilah sebelumnya harus diseleksi kembali. Pada tahapan ini peneliti menentukan kriteria data yang relevan dengan penelitian berdasarkan aktivitas akun media sosial, interaktivitas dan keragaman data. Dalam penelitian ini ditetapkan beberapa kriteria data terkait kasus NCII Rebecca Klopper, yaitu 1) komentar menunjukkan tindakan *victim blaming*; 2) akun yang memberikan komentar *victim blaming* merupakan akun X aktif yang ditunjukkan dengan setidaknya 1 postingan atau 1 *repost* dalam 2 minggu; 3) komentar mendapatkan *likes* atau balasan komentar dari pengguna lainnya; 4) komentar menggunakan kata yang menyiratkan tindakan *victim blaming*, misalnya bersifat sindiran, kata-kata kasar, mengejek, dan mengandung unsur seksual.

5) Menyimpan (*save*)

Tahap ini merupakan tahap terakhir dalam proses investigasi. Data yang telah diseleksi kemudian dikumpulkan dan disimpan untuk dianalisis lebih lanjut. Dalam penelitian ini, data disimpan dalam dua format sebagai berikut: 1) *screenshot*, yaitu gambar atau tangkapan layar dari tampilan perangkat seluler atau komputer. Format ini memungkinkan data untuk disimpan sesuai dengan aslinya; 2) *copy and paste*, hal ini dilakukan dengan mengkopi data yang telah diseleksi dan kemudian

memindahkannya ke dalam file lain, misalnya *word*, *pdf*, *excel* dan lain sebagainya.

1.8.5 Unit Analisis

Unit analisis merupakan satuan tertentu yang diteliti dan dapat memberikan informasi yang dibutuhkan untuk menjawab permasalahan penelitian. Dalam penelitian ini maka unit analisisnya adalah komentar *victim blaming* pengguna X dalam unggahan akun @*sosmedkeras* terkait kasus NCII Rebecca Klopper yang dilihat dari beberapa kategori, yaitu sebagai berikut:

- 1) Isi komentar yang memuat kata-kata, istilah dan kalimat yang digunakan dalam komentar *victim blaming* untuk memahami makna, motif, dan tujuan di baliknya.
- 2) Topik komentar, dalam hal ini yaitu mengklasifikasikan berbagai jenis topik komentar yang termasuk ke dalam kategori tindakan *victim blaming*, misalnya seperti komentar kritik terhadap pakaian Rebecca Klopper, humor seksis, *slutshaming* dan lain sebagainya
- 3) Pola respon, yaitu analisis bagaimana interaksi antar pengguna X dalam merespon komentar *victim blaming* di unggahan akun @*sosmedkeras*.

1.8.6 Analisis Data

Kozinets (2010) dalam *Netnography: Doing Ethnographic Research Online* mengemukakan bahwa analisis data dalam penelitian netnografi meliputi beberapa tahapan, yaitu:

- 1) Memberi Kode (*Koding*), pada tahap ini dilakukan pemberian kode atau kategori pada data-data yang telah dikumpulkan sehingga memudahkan peneliti dalam melihat persamaan dan perbedaan data. Secara khusus dalam penelitian ini digunakan pemberian kode dengan nama, 1) data komentar dan 2) penjelasan. Hal ini dilakukan guna mengetahui data komentar yang termasuk ke dalam tindakan *victim blaming*.
- 2) Noting, yaitu proses pencatatan yang dilakukan oleh peneliti terhadap data-data yang sudah diberikan kode dan dikategorikan sebelumnya. Dalam hal ini, pencatatan data meliputi jumlah komentar, *likes*, *repost*, *quote* dan *reply* yang muncul dalam tanggapan komentar *victim blaming* terhadap Rebecca Klopper.
- 3) Abstraksi, yaitu tahapan untuk mengidentifikasi dan mengaitkan kode atau label data yang serupa untuk diringkas ke dalam kategori atau konsep yang lebih umum
- 4) Pengecekan dan Perbaikan, dalam tahapan ini dilakukan pengecekan kembali data komentar *victim blaming* dalam unggahan *@sosmedkeras* yang sudah diberikan kode dan memperbaiki data jika ditemukan informasi baru sesuai kebutuhan.
- 5) Generalisasi, pada tahap ini dibuat penjelasan atas fenomena yang diteliti berdasarkan hasil abstraksi data yang telah dilakukan. Secara khusus penelitian ini menjelaskan interaktivitas komentar *victim blaming* terhadap Rebecca Klopper dan alasan dibalik munculnya fenomena *victim blaming* tersebut.

- 6) Teoretisasi, yaitu tahapan membandingkan dan mengaitkan penjelasan yang telah didapatkan pada tahap generalisasi dengan teori yang ada. Dalam penelitian ini dikaitkan data temuan penelitian dengan teori interaktivitas, konsep budaya patriarki, *rape myth* dan keyakinan *just world belief*.

1.8.7 Kualitas Data

Dalam sebuah penelitian kualitatif penting adanya konsep kesahihan (validitas) dan keandalan (realibilitas). Pengecekan kesahihan (validitas) dalam penelitian merupakan evaluasi kegiatan penelitian dari awal hingga akhir dan memberikan perhatian terhadap masalah penelitian dan alat atau metode penelitian yang digunakan. Sedangkan, konsep keandalan (realibilitas) dalam penelitian merupakan kekuatan data yang memberikan gambaran asli dan menunjukkan bahwa informasi yang diberikan adalah nyata adanya. Lebih lanjut, kualitas data dalam paradigma penelitian kritis menggunakan analisis *historical situatedness*, yaitu penelitian ditulis dengan memperhatikan latar belakang historis, sosial, politik, kebudayaan, ekonomi, etnik, dan gender (Denzin & Lincoln, 1994). Dalam penelitian ini, penulisan kualitas data yaitu dengan cara melibatkan pengecekan kesahihan (validitas) dan keandalan (reabilitas) yang dilakukan dengan mengintensifkan analisis data. Tak hanya itu penulisan penelitian ini juga memerhatikan konteks historis, sosial dan budaya yang melatarbelakangi komentar-komentar *victim blaming* dalam interaktivitas pengguna media sosial X terhadap unggahan akun @*sosmedkeras* terkait kasus NCII Rebecca Klopper.